

Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berkelanjutan

Tri Fansa P¹, Ratna Endang W², Cinta Cantika A C³, Reno Alfarel A⁴, Mulan Akmalia⁵, Rizky Galang A⁶

¹ Universitas Jember dan 240810101018@mail.unej.ac.id

² Universitas Jember dan 240810101118@mail.unej.ac.id

³ Universitas Jember dan 240910202054@mail.unej.ac.id

⁴ Universitas Jember dan 240910202100@mail.unej.ac.id

⁵ Universitas Jember dan 240810101121@mail.unej.ac.id

⁶ Universitas Jember dan 240810101121@mail.unej.ac.id

Article Info

Article history:

Received May, 2025

Revised May, 2025

Accepted May, 2025

Kata Kunci:

Pancasila, Pembangunan Berkelanjutan, Nilai-Nilai Kebangsaan, Keadilan Sosial, Etika Pembangunan

Keywords:

Pancasila, Sustainable Development, National Values, Social Justice, Development Ethics

ABSTRAK

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional berkelanjutan diselidiki dalam penelitian ini. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki kontribusi penting dalam mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sila Ketuhanan mengarahkan pembangunan yang berlandaskan etika spiritual; sila kemanusiaan memperkuat keadilan sosial; sila Persatuan menjamin integrasi nasional; sila Kerakyatan mendorong partisipasi publik; dan sila Keadilan Sosial menjadi dasar pemerataan hasil pembangunan. Bagaimana relevansi dari nilai-nilai Pancasila ini diaplikasikan ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan nasional dalam menghadapi dinamika global merupakan topik utama yang dibahas, terutama pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menemukan keseimbangan antara faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktik pembangunan merupakan kunci untuk mencapai kemajuan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The application of Pancasila values in sustainable national development is investigated in this study. Through a qualitative approach with a desk study method, this research shows that each of the precepts in Pancasila has an important contribution in supporting the principles of sustainable development. The Precept of Belief directs development based on spiritual ethics; the Precept of Humanity strengthens social justice; the Precept of Unity ensures national integration; the Precept of Democracy encourages public participation; and the Precept of Social Justice is the basis for equitable distribution of development results. How the relevance of these Pancasila values are applied to national development policies and practices in the face of global dynamics is the main topic discussed, especially the development of the Capital City of the Archipelago. Finding a balance between social, cultural, economic, and environmental sustainability factors. In conclusion, the integration of Pancasila values in development policies and practices is key to achieving inclusive, equitable, and sustainable progress.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Tri Fansa P

Institution: Universitas Jember

Email: 240810101018@mail.unej.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pancasila digunakan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki peran penting sebagai arah bangsa menuju kemajuan dan kemakmuran. Dengan perkembangan global yang semakin maju, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan Pembangunan nasional yang berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek ekonomi, aspek social, aspek budaya, dan aspek-aspek lainnya.

Pancasila sebagai Pembangunan nasional berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi, keberlanjutan, dan keadilan. Hal ini menunjukkan demokrasi Pancasila mempertimbangkan peran Masyarakat dalam pengambilan keputusan, tidak semata-merta berdasarkan suara mayoritas. Demokrasi yang berfungsi baik akan mendorong kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan dan keadilan, karena jika tidak demokrasi hanya akan sebagai instrument formal tanpa substansi.

Bentuk pembangunan nasional dapat berupa pembangunan nasional yang bersifat fisik dan pembangunan bersifat moral yang searah dengan ketetapan dan Pancasila. Pembangunan meliputi fisik maupun moral, pembangunan secara fisik merupakan pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan tol, dan jalan layang. Pembangunan ini bertujuan untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat yang pasti merasakan manfaat dari pembangunan ini.

Pembangunan nasional bersifat moral adalah pembangunan yang berlandaskan pandangan Pancasila. Pandangan Pancasila meliputi nilai atau norma yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bersifat moral bangsa dapat berupa, pembentukan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sedini mungkin.

Tujuan dari nilai-nilai ini adalah kita bersama-sama untuk mewujudkan tujuan cita-cita dalam mencapai tujuan nasional Indonesia melalui pembangunan nasional. Perlunya penerapan nilai dari Pancasila ini digunakan kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Serta relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan ini dapat terbukti ditunjukkan dengan melihat bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita terapkan untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan juga diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan maupun kehidupan masyarakat. Ia bukan

sekadar dokumen yang memiliki acuan norma, tetapi juga merupakan gabungan nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam budaya bangsa Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Pancasila lahir dari berbagai nilai baik budaya, adat, dan agama dimana secara alami telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Perumusan dilakukan oleh para pendiri bangsa melalui proses diskusi mendalam dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945. Ir. Soekarno menyampaikan bahwa Pancasila adalah hasil dari "penggalan jiwa bangsa", bukan adopsi dari ideologi asing semata.

Hariyono (2014) menyebutkan bahwa Pancasila dirumuskan dalam suasana penuh konflik dan ketegangan, namun dilandasi oleh semangat kebangsaan dan keinginan kuat untuk merumuskan dasar negara yang menyatukan. Dalam prosesnya, Pancasila berhasil merangkul kepentingan berbagai kelompok, etnis, dan agama, dan membentuk kebangsaan yang kuat.

Kaelan (2005) menekankan bahwa ideologi pada dasarnya adalah kumpulan ide atau gagasan dasar yang menjadi pedoman hidup bersama, dan memiliki ciri sistematis, menyeluruh, serta dapat dioperasionalkan. Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya sistem nilai yang hidup di masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai ideologi terbuka yang dapat berubah seiring waktu. Sebagai ideologi negara, Pancasila memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Ia menjadi penengah di tengah keberagaman dan mencegah tumbuhnya paham-paham ekstrem yang dapat mengancam integrasi nasional. Pancasila bersifat inklusif, menghargai perbedaan tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.

2.2 *Pembangunan Berkelanjutan*

Di era milenium ini, pembangunan berkelanjutan tidak lagi dipandang sebagai isu global yang melibatkan semua negara, baik negara maju maupun berkembang, melainkan telah menjadi isu yang terjadi secara global yang membuat seluruh negara terlibat, baik negara yang telah maju maupun yang sedang berkembang. Semua pihak memiliki tanggung jawab bersama dan perlu bekerja sama guna mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan berkelanjutan secara umum sangat dipengaruhi oleh kekuatan pada sektor pendidikan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan komitmen yang kokoh, dan sektor pendidikan memainkan peran yang paling penting dan strategis dalam proses ini. Pendidikan dan pembangunan berkelanjutan saling berkaitan dan berjalan beriringan: pembangunan berkelanjutan harus terintegrasi ke dalam sistem pendidikan yang baik, dan sebaliknya, pendidikan harus mampu menyediakan ruang sosial untuk menanamkan nilai, sikap, serta praktik yang mendukung kelestarian kehidupan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang bersifat lintas disiplin ilmu, lintas sektor, serta melibatkan partisipasi aktif, khususnya dalam pengelolaan sistem pendidikan.

2.3 *Nilai-Nilai Kebangsaan*

Nilai adalah sesuatu yang kita hargai, yang memiliki karakteristik khusus, dan bermanfaat bagi orang lain. Nilai instrumental harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar yang menjadi pondasinya. Meskipun bentuk konkret dari nilai-nilai tersebut

dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis, tujuan utamanya tetap untuk merealisasikan semangat yang sama. Dalam proses tersebut, nilai-nilai baru yang muncul tidak boleh bertentangan atau berbanding terbalik dengan nilai-nilai dasar yang telah ada. Menurut Isnindiyah (2014), nilai-nilai kebangsaan berkaitan erat dengan identitas bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan umum terkait pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh aspek pendidikan yang kuat. Untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan komitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sinilah peran pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan dan pembangunan berkelanjutan saling mendukung dan berjalan seiringan. Pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari proses pendidikan, sementara pendidikan memberikan ruang sosial untuk menanamkan sikap dan perilaku yang mendukung keberlanjutan hidup masyarakat.

2.4 Keadilan Sosial

Keadilan sosial itu suatu hal yang kompleks di masyarakat umum ini. Seseorang tidak bisa dikatakan adil hanya dengan sifatnya saja, tetapi juga harus memperhitungkan bagaimana struktur proses yang melingkupinya. Untuk mewujudkan keputusan yang adil tidak bisa melihat dari satu sisi saja, tetapi harus melihat pada berbagai sisi atau sudut pandang yang lain.

Keadilan sosial juga mempunyai konsep untuk menciptakan kesetaraan dan keseimbangan dalam hak, kewajiban, dan perbedaan yang ada. Di negara Indonesia ini, ada beberapa suku bangsa dan agama, kita sebagai rakyat juga harus saling mengenal dan bergotong royong satu sama lain. Bukannya mengolok-ngolok dan merendahkan seseorang yang berbeda dengan kita. Jika ke bhinneka tunggal ika bisa terwujud, maka keadilan sosial di Indonesia akan terlaksana juga.

2.5 Etika Pembangunan

Etika disini berdiri sebagai konsep yang kebenaran dan juga kebaikan dari tindak sosial. Sebuah pembangunan yang fokusnya hanya untuk membangun dan menyepelkan prinsip moral hingga mengeksploitasi lingkungan yang disekitarnya, tidak bisa disebut dengan etika pembangunan.

Etika pembangunan harusnya memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka melakukan pembangunan seenaknya saja dan tidak memedulikan pemukiman yang ada di sekitarnya. Maka dari itu proses pembangunan harus berlangsung secara adil dan tidak ada yang dirugikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan kualitatif, yaitu dengan pengumpulan data melalui penelusuran bahan pustaka, termasuk buku-buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk membangun konsep dan proporsi, penelitian deskriptif ini sering menggunakan analisis deduktif, melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh dan detail terhadap sumber dan bahan secara kritis dan mendalam untuk mendukung gagasan dan proporsinya. Metode pengumpulan data ini berfokus pada pemahaman dan penelaahan terhadap sumber yang relevan sesuai topik penelitian. Tujuan dari pendekatan pengumpulan data ini adalah untuk memahami dan memeriksa sumber-sumber berkaitan dengan masalah penelitian berfokus

pada penekanan pada pemahaman dan analisis menyeluruh terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks contoh nyata seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan rencana pembangunan nasional lainnya. Triangulasi sumber data, yang membandingkan berbagai sudut pandang dan sumber informasi untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan tidak memihak dari subjek yang diteliti, menjaga validitas temuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Interpretasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Berkelanjutan

Nilai-nilai Pancasila sangat berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan karena Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan filosofis dan operasional dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Diperlukannya Undang-undang yang mengatur sebagaimana arah pembangunan ini akan memberikan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat yang layak. Pembangunan berkelanjutan menurut Komisi Brundtland (1987) "Pembangunan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Konsep ini mencakup tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan untuk kesejahteraan tidak hanya mengukur pertumbuhan ekonomi tetapi diperlukan juga reformulasi indikator pembangunan dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti indeks kebahagiaan, indeks demokrasi. Dalam proses pembangunan ada aspek yang harus diperhatikan seperti pembangunan spiritual berguna sebagai pembangun jiwa antara kaitan dengan integritas manusia sebagai dasar wujud kemana arah pembangunan nasional itu tercapai. Namun seringkali dalam proses pembangunan tersebut ada dampak dari proses pembangunan baik dari aspek sosial, lingkungan, ekonomi.

Sebagai korelasi dalam pembangunan tentunya akan menghasilkan keuntungan atau dalam bentuk kerugian yang didapatkan. Kita dapat berargumen bahwa keuntungannya dapat dilihat dari proses pembangunan yang mendorong kesejahteraan sejalan dengan konstitusi dan prinsip Pancasila. Seperti, pada pembangunan IKN maka harus diperhatikan manfaat dari pembangunan tersebut apakah sudah sesuai keadilan dan kesejahteraan yang diperoleh masyarakat ataupun sebaliknya merugikan terhadap masyarakat. Seperti, hal di atas perlunya kesadaran untuk melihat dari segi positif maupun negatif. Dari segi positif pembangunan IKN diklaim akan mendorong pertumbuhan perekonomian diluar daerah jawa. Dari segi negatif prespektif dari segi sosial menuai kontra karena alokasi anggaran yang sangat besar yang seharusnya bisa dialokasikan kepada daerah yang membutuhkan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan.

4.2 Dampak Pembangunan IKN terhadap Implementasi Nilai- Nilai Pancasila

1. Dampak Terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Publik

Hasil penelitian menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur mempunyai dampak positif dan negatifnya, dampak negatif dari adanya pemindahan IKN ini adalah terjadinya ketidaksetujuan, ketidakpastian dan dampak buruk kepada masyarakat lokal. Pemberdayaan warga sekitar menjadi salah satu pendekatan yang ada sebagai solusi untuk mengurangi dampak negatif pemindahan IKN terhadap demokrasi dan masyarakat sipil. Pemberdayaan bisa menjadi salah satu strategi yang memungkinkan masyarakat sekitar mempunyai kontrol dan kontribusi aktif dalam proses pembangunan dan perubahan yang terjadi. Perlindungan hak- hak masyarakat lokal juga patut diperhatikan karena itu akan menjadi kunci dari

upaya pemberdayaan. Hak untuk masyarakat berpendapat, mendapat informasi yang akurat, serta terlibat dalam proses pembangunan menjadi hak-hak yang perlu dijamin. Menerapkan perlindungan hak-hak ini akan memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Kelemahan partisipasi publik dalam pembangunan IKN tidak hanya berdampak pada keabsahan proyek di mata masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan kualitas hasil pembangunan itu sendiri.

2. Dampak terhadap Keadilan Sosial Ekonomi

Dalam kajiannya, Bappenas menyebutkan bahwa pemindahan IKN diperkirakan akan memberi dampak bagus terhadap perkembangan ekonomi nasional, dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sekitar 0,1%. Pertumbuhan ini diyakini berasal dari optimalisasi potensi sumber daya yang ada, seperti perluasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang produktif serta pembuatan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang membutuhkan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Secara lebih rinci, Bappenas memperkirakan bahwa pemindahan IKN juga akan berdampak pada peningkatan gaji bagi tenaga kerja di wilayah sekitarnya, yang terealisasi dari perkembangan harga tenaga kerja sebesar 1,37%. Namun, proses pemindahan IKN juga diperkirakan akan menyebabkan sedikit peningkatan inflasi secara nasional. Menurut Bambang Brodjonegoro, inflasi diprediksi naik sebesar 0,2% selama masa transisi ini. Kenaikan inflasi ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat, yang kemudian memicu kenaikan harga barang-barang pokok dan tingginya konsumsi.

3. Dampak terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Pembangunan IKN mempunyai konsep Forest City dan Smart City yang idealnya mencakup nilai-nilai Pancasila di dalamnya, khusus nya dalam masalah keseimbangan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Namun, untuk menerapkan konsep tersebut sangatlah sulit, akibat Kalimantan awalnya banyak hutan sebagai lahannya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pembangunan tersebut akan merusak lingkungan, punahnya beberapa hewan, dan dampak ekosistem yang berada pada wilayah tersebut. Ketika dilihat dari perspektif Pancasila, keberlanjutan lingkungan tidak hanya terkait pada 1 hal saja, tetapi juga bagaimana manusia memberlakukan alam. Pembangunan IKN harusnya lebih di evaluasi lagi agar tidak terwujud konsep Forest City saja, tetapi juga harus melihat apakah pembangunan itu akan merusak lingkungan disekitarnya atau justru membantu melestarikan lingkungan di sekitarnya. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, pemerataan pembangunan nasional. Berpindahnya ibu kota berpotensi menjadi salah satu instrument pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah. Adanya perpindahan Ibu Kota Negara bisa saja mengurangi kepadatan yang sering terjadi di Jakarta. Baik itu kepadatan penduduk maupun kesibukan aktivitas pembangunan yang terjadi. Hal seperti itu dapat memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat yang bertahan di daerah Jakarta yang dimana kepadatan penduduk perkotaan yang dirasakan dapat berkurang, serta kepadatan dalam aktivitas pembangunan pun juga berkurang serta kepadatan dalam persaingan pekerjaan berkurang. Kepadatan kendaraan adalah salah satu penyebab kemacetan di Jakarta dan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat bertambah setiap tahunnya sedangkan pembangunan jalan baru sangat lama pengerjaannya. Hal ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas karena jalan yang dilewati mengalami pembangunan dan perbaikan

sedangkan kendaraan bertambah banyak. Dengan dilakukannya IKN dan diiringi dengan migrasi masyarakat, keadaan ini akan meminimalisir tingkat kepadatan penduduk dan juga tingkat kepadatan kendaraan serta tingkat polusi di Jakarta akan berkurang.

5. KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nilai-nilainya tidak hanya menjadi pijakan moral, tetapi juga arah strategis pembangunan yang mempertimbangkan nilai luhur Pancasila. pembangunan yang berlandaskan Pancasila harus mencerminkan demokrasi partisipatif dan keadilan sosial. Proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila diuji dalam praktik, baik dari segi kualitas demokrasi, partisipasi publik, maupun dampak terhadap keadilan sosial-ekonomi. Di sinilah pentingnya etika pembangunan agar setiap proses pembangunan tidak sekadar memenuhi target fisik, tetapi juga menjunjung tinggi keberlanjutan, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban, selaras dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai luhur kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiro Puji Asmaroini, M. (2017). MENJAGA EKSISTENSI PANCASILA DAN PENERAPANNYA BAGI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI.
- Arifin, M. Z. (2023). STRATEGI PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MEMBENTUK NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA ANAK USIA DINI. 42-50.
- Asri, S. (2017). ETIKA DALAM PEMBANGUNAN INTERNATIONAL.
- Bernadus Wibowo Suliantoro, C. W. (2018). Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren.
- Ellisa Wulan Oktavia, N. I. (2024). Dampak Pemindahan IKN Nusantara dan Tantangannya Terhadap Pembangunan Perekonomian Lokal. *SEIKO: Journal Of Management and Business*, 1107-1121.
- Hamdani, R. S. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- Irwansyah, D. I. (2024). Dampak Pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur: Perspektif Democracy Civil Society. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
- Mazda, C. N. (2022). ANALISIS DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP SOCIAL SECURITY. *Enersia Publika*.
- Sri Wahyuningsih, S. S. (2021). PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM KAITAN NILAI-NILAI PANCASILA KEARAH TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL. 415-417.